

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan bangsa Indonesia dalam sektor pendidikan adalah pemerataan pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki visi yakni terwujudnya Sistem Pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Perkembangan dalam dunia pendidikan khususnya pada sistem pendidikan sampai saat ini selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Reformasi dalam dunia pendidikan harus mengedepankan hak-hak dan kesempatan bagi semua warga negara agar dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu dan dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap individu.

Upaya pemerataan pendidikan di Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan wajib belajar khususnya dalam jenjang pendidikan dasar sejalan dengan pesan 'pendidikan untuk semua (*education for all*)'. Melalui pesan tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi semua anak untuk memperoleh pendidikan tanpa terkecuali. Menurut Hildegun Olsen (2003) pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Pendidikan inklusif juga mengatur hak semua peserta didik dengan beragam kebutuhan untuk mengakses pendidikan di sekolah pilihan mereka (Forlin C, 2010).

Melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi diharapkan hal tersebut dapat menjadi alternatif dalam melakukan upaya pemerataan pendidikan di Indonesia, sebab tujuan dari pendidikan inklusif yakni menciptakan dan membangun pendidikan yang berkualitas, menerima keanekaragaman,

menghargai perbedaan, menciptakan suasana kelas yang menampung semua anak secara penuh dengan menekankan suasana kelas yang menghargai perbedaan menyangkut kemampuan, kondisi fisik, sosial ekonomi, suku, agama dan mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, sosial, intelektual, bahasa dan kondisi lainnya.

Implementasi pendidikan inklusif secara formal telah dideklarasikan pada tahun 2004 di Kota Bandung. Dengan adanya deklarasi tersebut maka menaruh harapan terhadap sekolah reguler untuk mempersiapkan layanan pendidikan bagi semua anak, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang lebih baik. Implementasi pendidikan inklusif tentunya membutuhkan berbagai dukungan, baik dukungan secara sistem, sumber daya, finansial dan dukungan lainnya. Salah satu dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah keberadaan pusat sumber (*resource center*).

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Bab I Pasal 1 (23) menyatakan bahwa:

Lembaga Pendukung Pendidikan atau Pusat Sumber yang selanjutnya disebut LPP/PS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, yang manajemennya dikelola secara independen, serta memberikan dukungan kekuatan (*supporting power*) dan dukungan profesional (*professional support*) bagi kelangsungan dan keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Menurut Gunansyah (2018) pusat sumber atau *resource center* merupakan lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka pengembangan pendidikan khusus atau pendidikan inklusif yang dapat dimanfaatkan oleh semua anak, serta pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi dan melatih berbagai keterampilan, serta memperoleh berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan berkebutuhan khusus/pendidikan inklusif. Ministry of Education (2012) mendefinisikan pusat sumber sebagai 'pusat pedagogis yang dilengkapi dengan bahan khusus dan alat bantu serta staf yang profesional untuk memberikan dukungan kepada siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus, guru, dan sekolah sekitar'. Keberadaan pusat sumber (*resource center*) sangat

penting dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif, terutama bagi sekolah inklusi maupun sekolah umum yang menerima anak berkebutuhan khusus dan sekolah tersebut tentunya membutuhkan layanan pendidikan khusus. Maka, pelaksanaan pendidikan inklusif secara teknis memerlukan sistem pendukung yakni saat ini keberadaan Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber (*resource center*). Sebuah penelitian di Hong Kong, fokusnya adalah pada model *resource center* yang mendukung sekolah umum yang menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekolah-sekolah khusus dan sekolah umum di Hong Kong dipersilakan untuk membentuk sekolah mereka sebagai pusat sumber dukungan untuk sekolah-sekolah umum (Forlin C dan Rose, 2010). Selain itu, baik sekolah umum dan sekolah khusus dipilih untuk dikonversi menjadi RC, walaupun tampaknya sekolah khusus lebih disukai karena ketersediaan sumber daya dan keahlian mereka (Federal Ministry of Education, 2015).

Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi pusat sumber (*resource center*) bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di sekitarnya. Keberadaan *resource center* tersebut tentunya sangat berperan dalam memberikan layanan pendidikan bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Bandung. Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap masyarakat mengenai informasi yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan, penanganan serta pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (2011) fokus pengembangan Sekolah Luar Biasa sebagai pusat sumber dalam mendukung implementasi pendidikan inklusif adalah sebagai berikut:

1. Pusat layanan informasi pendidikan khusus
2. Pusat layanan pelatihan dan keterampilan
3. Pusat layanan asesmen
4. Pusat layanan pengembangan media pembelajaran
5. Pusat layanan bantuan profesional
6. Pusat layanan advokasi ABK/dan orang tua

Menurut Balai Pelatihan Guru Sekolah Luar Biasa (BPG SLB) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (2008) menjelaskan hasil monitoring dan

evaluasi antara lain: (1) masih kurang dukungan dari kepala sekolah; (2) kurang tersedianya aksesibilitas fisik bagi ABK; (3) kurang berperannya SLB sebagai *resource center* (pusat sumber); dan (4) belum adanya perubahan sistem evaluasi sesuai dengan kondisi ABK. Permasalahan yang sama ditemukan oleh peneliti yaitu peran *resource center* SLBN Cicendo pada fokus pengembangannya sebagai pusat pelatihan masih belum berjalan secara optimal. Sejalan dengan hasil penelitian Eleweke & Rodda (2002) bahwa meskipun peraturan perundangan bagi penerapan pendidikan inklusif telah diberlakukan, fasilitas dan pelatihan guru yang tersedia masih belum memadai. Selain itu penerapan sistem pendidikan inklusi ditujukan untuk pengembangan kebijakan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, kapasitas bangunan atau lokal, dan keterlibatan masyarakat serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait (Tarmansyah, 2009).

Permasalahan yang ditemukan dilapangan yaitu belum optimalnya *resource center* SLBN Cicendo sebagai pusat pelatihan disebabkan karena *resource center* SLBN Cicendo belum memiliki program secara operasional ataupun rencana kerja terkait program pelatihan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) sesuai kebutuhan mereka sehingga saat ini kinerja *resource center* belum optimal. Selain itu, peran *resource center* SLBN Cicendo dalam hal pelatihan untuk guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) cenderung pasif dan insidental tergantung ada atau tidaknya kasus yang perlu ditangani atau cenderung menunggu sekolah tersebut yang meminta bantuan kepada *resource center*, sehingga salah satu program Bidang Asesmen dan Litbang dari *resource center* yakni melakukan *need* asesmen terhadap sekolah reguler yang berkaitan dengan pembelajaran dalam setting inklusif dan kajian pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang salah satu bentuk kegiatannya yakni pelatihan bagi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif saat ini belum optimal. Berdasarkan penelitian Bailey L, dkk (2015) bahwa guru tidak siap untuk bekerja menuju inklusi karena kurangnya dukungan.

Permasalahan yang peneliti temukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang peneliti kunjungi belum memiliki guru pendidikan khusus atau pun guru pembimbing khusus untuk membantu dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik dengan disabilitas yang ada di sekolah mereka. Hal ini sejalan pula dengan pernyataan Mukhopadhyay dkk (2012) mengingat fakta bahwa terdapat kelangkaan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di negara berkembang, guru harus dilatih untuk menjadi inovatif sehingga mereka dapat menyesuaikannya dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas. Selain itu, menurut informasi dari sekolah tersebut mereka hanya pernah menerima sosialisasi tentang pendidikan inklusif dan sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi bukan secara khusus diselenggarakan oleh pihak *resource center*, terkait implementasi pendidikan inklusif belum pernah dilaksanakan, padahal menurut Ryndak, dkk (2013) bahwa salah satu cara untuk mendukung siswa dengan disabilitas agar memiliki akses yang lebih besar ke seting dan kurikulum pendidikan umum adalah dengan kegiatan pengembangan profesional untuk memastikan pendidik memiliki keahlian untuk menerapkan praktik yang efektif bagi peserta didik dalam seting inklusif. Para guru membutuhkan peningkatan profesional dan mempraktekkan kompetensi pedagogiknya agar mampu menjalankan tugas sebagai pendidik satuan pendidikan inklusif (Purnomo, E, 2016).

Permasalahan lainnya yakni terkait kondisi guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus yang ada di sekolah mereka sehingga mereka membutuhkan pelatihan khususnya program pembelajaran individual. Rahmasari, D (2015) juga mengungkapkan bahwa pola pembelajaran yang harus disesuaikan dengan anak berkebutuhan khusus biasa disebut dengan *Individualized Education Program* (IEP) atau Program Pembelajaran Individual (PPI).

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti merasa penting untuk mengambil judul penelitian tentang program pelatihan program pembelajaran individual (PPI) di *resource center SLBN Cicendo* Kota Bandung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah “Bagaimanakah program pelatihan program pembelajaran individual (PPI) di *resource center SLBN Cicendo* Kota Bandung?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi objektif program pelatihan program pembelajaran individual (PPI) di *resource center SLBN Cicendo* terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif?
2. Bagaimanakah rumusan program pelatihan program pembelajaran individual (PPI) di *resource center SLBN Cicendo*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh suatu program pelatihan program pembelajaran individual (PPI) di *resource center SLBN Cicendo* untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian keilmuan pendidikan khusus terkait pusat sumber (*resource center*) dan sistem pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Sebagai sumbangsih dalam upaya optimalisasi salah satu fokus pengembangan *resource center* SLBN Cicendo sebagai pusat pelatihan serta upaya perbaikan dalam implementasi program pelatihan di *resource center* terhadap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bandung.
- b) Sebagai rekomendasi dalam meningkatkan peran *resource center* dalam pemberian layanan khususnya pelatihan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Bandung